

Volume 2, No. 2, 1 Agustus 2009

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI SWASTA DI INDONESIA
Dr. Tadjuddin Parenta, MA.

PROSPEK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
Drs. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI TIKET
PADA PT. DUTA TOUR JUMANTARA DI KOTA MAKASSAR
Fauziah Umar, MM.

PENGEMBANGAN SUB-SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA INDONESIA
Ahmad Syarif Iskandar, SE., MM.

HARTA MILIK PRIBADI, PEROLEHAN, DAN PEMANFAATANNYA MENURUT AJARAN ISLAM
Hj. Muhajirah, S.Ag.

GAGASAN ISLAM TENTANG WIRUSAHA
Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA.

JURNAL EKONOMI
MuAMALah

Jurnal Ekonomi

MuAMALah

STAIN PALOPO



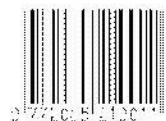
Program Studi Ekonomi Islam
Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palopo

Volume
1

No.
2

Agustus
2009

ISSN
2085-2193



Program Studi Ekonomi Islam
Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palopo



DAFTAR ISI

JURNAL MUAMALAH VOL.1, NO.2, AGUSTUS 2009

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI SWASTA DI INDONESIA <i>Dr. Tadjuddin Parenta, MA.</i>	1-13
PROSPEK EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA <i>Drs. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.</i>	14-22
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMBELI TIKET PADA PT. DUTA TOUR JUMANTARA DI KOTA MAKASSAR <i>Fauziah Umar, MM</i>	23-33
PENGEMBANGAN SUB-SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA INDONESIA <i>Ahmad Syarief Iskandar, SE.,MM.</i>	34-50
HARTA MILIK PRIBADI, PEROLEHAN, DAN PEMANFAATANNYA MENURUT AJARAN ISLAM <i>Hj. Muhajirah, S.Ag.</i>	51-58
GAGASAN ISLAM TENTANG WIRAUUSAHA <i>Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA</i>	59-72

PENGEMBANGAN SUB-SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara agraris, dengan luas wilayah sebesar 1.860.359,67 kilometer persegi, di mana sebahagian besar terdiri dari lautan, yaitu sebesar 70% dari wilayah Indonesia dan 30% terdiri dari daratan. Wilayah Indonesia yang bersuhu tropis dan ditunjang dengan keadaan tanah yang cocok untuk bercocok tanam membuat sebahagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dengan bekerja pada sektor pertanian.

Sektor pertanian Indonesia, dewasa ini dan pada masa mendatang, masih akan menghadapi tantangan yang besar baik internal maupun eksternal. Secara eksternal, pertanian Indonesia dihadapkan pada persaingan yang ketat dengan negara-negara produsen komoditas-komoditas komersial. Bahkan persaingan perebutan pasar tidak hanya terjadi di pasar internasional tetapi juga terjadi di pasar dalam negeri. Hal ini diakibatkan karena besarnya potensi dalam negeri Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Secara internal, berbagai permasalahan juga dialami petani, seperti rendahnya pengetahuan, kurangnya modal, rendahnya penggunaan teknologi dan berbagai permasalahan lainnya.

Pangan merupakan kebutuhan hidup terpenting bagi manusia, setelah udara dan air. Oleh karenanya ketahanan pangan individu, rumah tangga, dan komunitas merupakan hak azasi manusia. Lebih dari pada itu ketahanan pangan merupakan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan atas pangan dan penjajahan melalui pangan diatas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pengertian pangan sendiri juga memiliki dimensi yang luas. Mulai dari pangan yang esensial bagi kehidupan manusia yang sehat dan produktif (keseimbangan kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serat, dan zat esensial lain); serta pangan yang dikonsumsi atas kepentingan sosial dan budaya, seperti untuk kesenangan, kebugaran, kecantikan, dan sebagainya. Dengan demikian, pangan tidak hanya berarti pangan pokok, dan jelas tidak hanya berarti beras, tetapi pangan yang terkait dengan berbagai hal lain (Krisnamurthi, 2003).

Sektor pertanian sejak awal PELITA I sampai saat ini selalu disebut-sebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, selama Orde Baru, sektor pertanian, terutama sub-sektor tanaman pangan dan para pelaku utamanya yaitu petani tidak mendapatkan perlakuan dari pemerintah yang sesuai dengan statusnya

di atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah yang berorientasi kepada swasembada pangan Indonesia tidak menjadikan sub-sektor tanaman pangan sebagai subyek pembangunan tetapi lebih menjadikannya sebagai suatu obyek yang diperas habis-habisan potensinya untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Penanaman varietas padi unggul yang rentan hama secara besar-besaran sejak awal tahun 1970-an yang berakibat pada hilangnya 3000 jenis varietas padi lokal Indonesia, penggalakan penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dan tidak mempertimbangkan kelestarian kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan yang semuanya dilakukan untuk memenuhi target penyediaan pangan merupakan contoh bagaimana petani dijadikan sekedar alat untuk memproduksi pangan (Arfian dan Wijonarko, 2000).

Masalah ketahanan pangan nasional masih merupakan hal yang kompleks bagi Indonesia, mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan pendapatan pangan mempunyai efek multidimensi. Ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi tercapainya ketahanan politik, ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi yang akan bermuara pada ketahanan negara dalam menjamin kestabilan aktivitas masyarakatnya.

Pada tahun 1984/1985, Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada beras, namun hal tersebut tidak bertahan. Pemenuhan kebutuhan pangan untuk konsumsi masyarakat akhir-akhir ini dengan mengandalkan hasil pertanian dari masyarakat dalam negeri ternyata tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir terjadi impor beras dari luar negeri.

Salah satu penyebab terjadinya ketidakcukupan produksi beras lokal untuk dikonsumsi penduduk adalah karena Indonesia merupakan pengonsumsi beras terbesar di dunia, yaitu mencapai 1.390 kg/kapita/tahun, sementara di Malaysia hanya mencapai 70 kg/ kapita/tahun, sedangkan di Jepang hanya mencapai 60 kg/ kapita/tahun (Pikiran Rakyat, 17/03/07).

Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat petani adalah harga komoditas pangan di dalam negeri sangat rendah utamanya pada musim panen sementara harga pupuk dan pestisida tinggi, sehingga margin yang diperoleh petani sangat kecil bahkan kadang-kadang merugi. Hal ini menyebabkan usaha pertanian tanaman pangan kemudian banyak ditinggalkan digantikan dengan tanaman-tanaman lain yang memiliki harga jual yang lebih tinggi, atau lahan pertanian mereka dikonversi menjadi tempat bangunan perkantoran, *real estate*, pabrik dan lain-lain. Dilihat dari segi wilayah (Haris dalam Pikiran Rakyat, 2003), konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa sebesar 54%, Sumatra 38%. Akan tetapi, jika dilihat dari bentuk perubahannya, perubahan terbesar adalah menjadi lahan perkampungan/lahan permukiman (69%) dan kawasan industri (20%). Sebagai dampak dari semua itu adalah semakin sempitnya atau bahkan hilangnya lahan subur untuk lahan pertanian produktif yang dapat menghasilkan pangan yang cukup bagi sekira 228 juta penduduk Indonesia yang tetap tumbuh dengan pesat.

Pada usaha hortikultura yang meliputi tanaman buah, sayuran, tanaman obat (biofarmaka), dan tanaman hias, sebahagian masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional dalam budidayanya sehingga memiliki produktivitas yang rendah dan memiliki kualitas yang rendah. Budidaya dengan penggunaan cara-cara modern lebih banyak dilakukan oleh dunia usaha yang memiliki modal yang besar dan pengetahuan yang memadai.

Beberapa hasil tanaman buah sebenarnya memiliki prospek pasar luar negeri yang cukup besar namun tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh sebahagian besar petani buah karena pasar luar negeri memiliki standar mutu yang tinggi sehingga tidak semua hasil produksi buah dalam negeri tersebut yang dapat diekspor.

Pengalaman Thailand dalam melakukan penetrasi pasar internasional dalam pemasaran produk pertanian komersial (agribisnis) yang dimilikinya dapat dijadikan pelajaran. Kemajuan yang dicapai Thailand tersebut tidak lepas dari kekuatan dan kemauan seluruh masyarakatnya untuk mengembangkan komoditas unggulan dalam rangka meningkatkan pendapatan para petaninya. Apalagi komoditas ekspor tersebut umumnya bukan merupakan hasil *estate*, melainkan merupakan hasil pertanian rakyat. Lain halnya di Indonesia, hasil pertanian rakyat sangat sedikit menjadi konsumsi masyarakat internasional, karena selama ini komoditas agribisnis andalan Indonesia untuk pasar ekspor berasal dari produsen perkebunan atau perusahaan besar, sehingga nilai tambah yang tercipta hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat (Gumbira-Said dan Intan, 2001).

Sektor pertanian Indonesia merupakan suatu sistem yang kompleks karena melibatkan sebahagian besar penduduk Indonesia sebagai produsen dan 100% penduduknya sebagai konsumen. Di samping itu juga melibatkan banyak perusahaan, baik yang bergerak dalam produksi dan pengolahan produk pertanian maupun yang menyediakan jasa untuk sektor pertanian, seperti jasa pemasaran, asuransi pertanian, jasa penelitian dan pengembangan, penyediaan dan penyalur dana, dan jasa lainnya. Kompleksitas pada sektor pertanian tersebut memberikan implikasi pada kompleksitas sistem pemasaran produk pertanian. Sistem pemasaran komoditas pertanian juga relatif lebih kompleks dibandingkan komoditas lainnya, di luar komoditas pertanian. Hal ini disebabkan oleh sifat produk, sistem produksi, serta struktur dan karakteristik pasar produk pertanian yang khas.

B. POTENSI DAN PERKEMBANGAN PRODUKSI

Potensi

Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura, ditunjang dengan kondisi agroklimat yang cocok

untuk berbagai macam tanaman yang dapat dilihat dari beragamnya macam tanaman yang telah dikembangkan masyarakat. Dari segi tenaga kerja, Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar, jumlah angkatan kerja Indonesia pada tahun 2005 sebanyak 105.854.254 jiwa dan yang bekerja 94.948.118 jiwa dan tidak pernah bekerja sebanyak 7.147.904 jiwa, sedang yang pernah bekerja 3.706.350 jiwa (BPS, 2005).

Hasil tanaman pangan digunakan sebahagian besar untuk konsumsi dalam negeri. Pada neraca perdagangan di tabel 1 terlihat bahwa pada komoditas beras Indonesia dari tahun 1998 hingga 2005 terus menerus mengalami defisit (ekspor lebih kecil daripada impor). Sedang pada komoditas Jagung neraca perdagangan hanya mengalami surplus (ekspor lebih besar daripada impor) di tahun 1998, sedang di tahun selanjutnya hingga 2005 mengalami defisit. Komoditas utama tanaman pangan yang konsisten mengalami surplus hanya komoditas ubi jalar karena impor tidak ada.

Dari data tersebut terlihat bahwa masih terdapat potensi permintaan dalam negeri karena belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat dalam negeri terhadap komoditas beras, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Selain itu pasar ekspor juga masih terbuka untuk berbagai komoditas-komoditas ini, meskipun harus menghadapi persaingan harga dari negara-negara lain yang mampu menghasilkan produksi tanaman pangan dengan harga yang lebih rendah.

Tabel 1. Neraca Volume Perdagangan Beberapa Komoditas Utama Tanaman Pangan Tahun 1998 – 2005 (Juta ton)

Komoditas	Kinerja	Tahun							
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
Beras	Ekspor	0,018	0,010	0,004	0,052	0,005	0,000	0,001	0,084
	Impor	2,900	4,752	1,380	0,648	1,810	1,448	0,237	0,122
	Neraca	-2,882	-4,742	-1,376	-0,596	-1,805	-1,448	-0,236	-0,038
Jagung	Ekspor	0,629	0,095	0,030	0,091	0,016	0,034	0,033	0,066
	Impor	0,326	0,633	1,284	1,075	1,194	1,365	1,089	0,172
	Neraca	0,303	-0,538	-1,254	-0,984	-1,178	-1,331	-1,056	-0,106
Kedelai**	Ekspor	0,000	0,000	0,005	0,001	0,000	0,000	0,001	0,008
	Impor	0,343	1,302	1,278	1,136	1,365	1,193	1,116	2,890
	Neraca	-0,343	-1,302	-1,273	-1,135	-1,365	-1,193	-1,115	-2,882
Kacang Tanah	Ekspor	0,009	0,007	0,009	0,010	0,009	0,015	0,008	0,008
	Impor	0,072	0,118	0,133	0,120	0,178	0,127	0,090	0,146
	Neraca	-0,063	-0,111	-0,124	-0,110	-0,169	-0,112	-0,082	-0,138
Ubi Jalar	Ekspor	0,005	0,006	0,007	0,008	0,000	0,010	0,013	0,010
	Impor	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Neraca	0,005	0,006	0,007	0,008	0,000	0,010	0,013	0,010
Ubikayu	Ekspor	0,335	0,440	0,165	0,218	0,004	0,044	0,234	0,240
	Impor	0,082	0,008	0,209	0,067	0,026	0,193	0,002	0,040
	Neraca	0,253	0,432	-0,044	0,151	-0,022	-0,149	0,232	0,200

Sumber Data : BPS diolah

Ket :

* data s/d Juni 2005 kemudian dikalikan 2.

**kedelai primer

Potensi dalam negeri pengembangan tanaman pangan dan hortikultura (umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sayuran dan buah) juga terlihat dari semakin bertambahnya konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dan juga bertambahnya tingkat pendapatan masyarakat, serta juga bisa diakibatkan bergesernya pola konsumsi masyarakat dari beras ke jenis pangan lainnya. Dari empat kelompok bahan pangan yang disajikan di tabel 2, hanya bahan pangan padi-padian saja yang mengalami adanya penurunan konsumsi, sedang pada kelompok bahan pangan yang lain (umbi-umbian, kacang-kacangan, serta sayur dan buah-buahan) mengalami tren peningkatan yang cukup besar.

Tabel 2. Perkembangan Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia Tahun 1999, 2002, 2003, 2004, dan 2005

Kelompok Bahan Pangan	1999	2002	2003	2004	2005
I. Padi-padian	346,3	348,9	328,10	322,81	320,42
a. Beras	319,1	316,4	300,58	293,15	288,30
b. Jagung	9,3	9,4	7,76	8,67	9,09
c. Terigu	17,9	23,2	19,76	21,00	23,03
II. Umbi-umbian	50,2	49,6	48,76	64,23	59,97
a. Singkong	36,7	35,0	32,76	41,38	41,19
b. Ubi jalar	8,3	7,7	9,14	14,71	10,87
c. Kentang	2,7	4,9	4,43	5,00	4,78
d. Sagu	1,3	0,7	0,71	1,14	1,42
e. Umbi lainnya	1,1	1,3	1,71	2,00	1,71
III. Kacang-kacangan	18,6	24,3	22,78	23,73	25,50
a. Kedelai	15,6	19,5	18,99	19,79	21,33
b. Kacang tanah	1,2	2,1	1,57	1,80	1,89
c. Kacang hijau	1,3	2,1	1,77	1,71	1,79
d. Kacang lain	0,4	0,6	0,44	0,43	0,48
IV. Sayuran dan buah	162,3	204,6	219,55	208,31	226,08
a. Sayur	111,6	130,1	138,98	134,16	139,13
b. Buah	50,7	74,4	80,57	74,14	86,96

Sumber : Susenas 1999, 2002, 2003, 2004 dan 2005; BPS diolah Pusat KKP

Untuk hasil tanaman hortikultura, sebahagian juga digunakan untuk konsumsi lokal, dan sebahagian lagi diekspor ke luar negeri. Konsumsi perkapita lokal terhadap total buah dan sayuran cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 1990 hingga tahun 2005. Bila diperbandingkan secara umum konsumsi total buah dan sayuran mengalami peningkatan di tahun 2005 menjadi 66,86 kg/th dari 66,18 kg/th di tahun 1990.

Sumbangan peningkatan konsumsi perkapita dihasilkan oleh konsumsi buah yang meningkat, sedang konsumsi perkapita sayuran justru turun dari 36,24 kg/th di tahun 1990 menjadi 35,30 di tahun 2005 (BPS).

Nilai ekspor produk atau komoditi hortikultura Indonesia jauh lebih kecil daripada impor di tahun 2005. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 206.673.922 US\$, dan nilai impor sebesar 335.551.562 US\$. Padahal sebelumnya di tahun 1991 nilai ekspor Indonesia jauh lebih besar dibandingkan impor yang masuk, di mana nilai ekspor di tahun 1991 sebesar 129.061.897 US\$ dan nilai impor sebesar 66.199.957 US\$.

Peningkatan nilai impor yang sangat besar diakibatkan salah satunya oleh adanya liberalisasi perdagangan. Hal ini membuat membanjirnya komoditi-komoditi dari luar negeri ke Indonesia. Komoditas dengan nilai ekspor terbesar pada hasil tanaman hortikultur adalah tanaman buah nenas dengan nilai ekspor sebesar 91.795.685 US\$, sedang komoditi yang paling besar nilainya dalam impor adalah komoditi bawang putih dan jeruk dengan nilai sebesar 58.260.059 US\$ dan 39.417.189 US\$. Selain itu impor tanaman bawang merah dan kentang juga memiliki nilai yang cukup besar .

Dari gambaran data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha tani/agribisnis di bidang tanaman hortikultura masih menjanjikan, selain untuk pasar ekspor, juga untuk pasar domestikpun masih tersisa pasar yang memungkinkan untuk diraih. Hampir semua komoditas impor tersebut, sebenarnya dapat dibudidayakan di Indonesia. Tentu saja, dengan dengan mengandalkan keunggulan pada biaya transportasi yang lebih rendah (dengan asumsi biaya yang lain sama), mampu menjadikan produk tanaman hortikultura Indonesia menjadi lebih murah.

Untuk tanaman obat (biofarmaka), pemanfaatan sumber daya hayati Indonesia yang begitu besar untuk tanaman obat, ternyata belumlah optimal. Menurut Murdanoto (2002: 3), hutan Indonesia memiliki 9606 spesies tanaman obat. Dari jumlah itu, tercatat 350 tanaman obat telah diidentifikasi mempunyai khasiat obat. Sedang menurut Hidayat *dalam* Trubus (2000: 35), bahwa sebanyak 1.375 tanaman telah terdeteksi sebagai tanaman obat, namun secara empirik yang telah digunakan mencapai 400 tanaman. Nilai ekspor tanaman obat periode 1991-2005 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 1.717.238 US\$ menjadi 4.819.166 US\$.

Perkembangan Produksi

Perkembangan produksi pada Indonesia dari tahun 1978 hingga 2007 (sebagaimana terlihat pada tabel 3), dapat dikatakan mengalami tren peningkatan dari waktu ke waktu, namun bertambahnya jumlah penduduk Indonesia membuat tingkat kebutuhan terhadap beras juga meningkat melebihi jumlah produksi beras domestik, sehingga produksi dalam negeri tidak belum mampu untuk memenuhi permintaan dalam negeri.

Tabel 3. Produksi Padi Indonesia Tahun 2000 – 2007 (000 ton)

Tahun	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*	2007**
Produksi	51899	50461	51490	52138	54088	54151	54402	53133

Sumber : BPS

Keterangan : * Angka Sementara
 **Angka Ramalan I

Dari segi produktivitas, tanaman pangan padi dan jagung mengalami peningkatan dalam periode 2001-2007, sedang tanaman pangan kedelai mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005, di mana pada tahun 2007 produktivitas tanaman pangan kedelai sebesar 12,98 ku/ha, sedang di tahun 2005 sebesar 13,01 ku/ha.

Produksi sayuran Indonesia dari tahun 1996 hingga 2005, tidaklah terlalu menggembirakan. Produksi total sayuran Indonesia di tahun 1996 adalah sebesar 8.925.050 ton, sedang produksi di tahun 2005 hanya naik tipis menjadi 9.011.417 ton. Sayuran yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah kembang kol, wortel, labu siam, dan melinjo. Sayuran yang lain cenderung mengalami fluktuasi dan cenderung hasil produksinya datar. Dari aspek produktivitas tanaman sayuran sebenarnya mengalami peningkatan, di mana produktivitas secara total sayuran di tahun 1996 adalah sebesar 9,06 ton/hektar dan di tahun 2005, meningkat menjadi 9,88 ton/hektar. Peningkatan produktivitas terbesar adalah pada tanaman sayur labu siam dan wortel. Peningkatan produktivitas hasil tanaman sayuran tidak diikuti oleh peningkatan hasil produksi karena terjadi penurunan jumlah areal panen tanaman sayuran, di mana pada tahun 1996, jumlah areal panen sayuran adalah seluas 984.709 hektar, yang kemudian menjadi 912.183 hektar (BPS).

Produksi tanaman buah-buahan pada tahun 1996 adalah sebesar 8.292.288 ton, yang kemudian terus menurun hingga tahun 1999, lalu kemudian meningkat secara konsisten hingga tahun 2004 menjadi 14.348.456 ton dan kembali menurun di tahun 2005 menjadi 14.313.101 ton. Tanaman buah-buahan yang mengalami peningkatan yang cukup tajam selama 9 tahun (1996-2005) adalah jeruk, pisang, salak, durian, dan mangga (BPS). Dari aspek produktivitas, tanaman buah-buahan berbeda dengan tanaman sayuran justru mengalami penurunan. Sebagaimana ditampilkan pada tabel 13, produktivitas tanaman buah-buahan pada tahun 1997 adalah sebesar 20,51 ton/ha dan di tahun 2005 sebesar 20,12 ton/ha. Peningkatan jumlah produksi pada tanaman buah disebabkan karena adanya kenaikan yang cukup signifikan luas panen luas dari 589.029 hektar di tahun 1996 menjadi 711.463 hektar di tahun 2005.

Pada tanaman hias terjadi penurunan produksi yang sangat drastis di tahun 1997, dan mulai meningkat kembali hingga tahun 2005 meskipun tingkat produksinya mencapai produksi di tahun 1996. Tanaman hias yang mengalami penurunan sangat tajam adalah mawar dan melati. Penurunan juga terjadi pada produktivitas tanaman hias, di mana pada tahun 1996 adalah sebesar 12,74 tangkai/m² menjadi 3,32 tangkai/m² di tahun 2005. Sedang pada tanaman biofarmaka, meskipun sempat mengalami penurunan pada periode 1996-1999, produksi tanaman biofarmaka kembali meningkat di tahun selanjutnya hingga mencapai 282.204.197 kg di tahun 2005. Produktivitas tanaman biofarmaka sebenarnya mengalami penurunan yang cukup

tajam dari 3,28 kg/m² menjadi 1,71 kg/m², namun karena adanya pertambahan luas areal panen dari 74.577.669 m² (tahun 1996) menjadi 165.117984 m² di tahun 2005, menyebabkan jumlah produksinya tetap meningkat.

C. PERMASALAHAN PENGEMBANGAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura agaklah kompleks karena melibatkan petani itu sendiri, kelembagaan (termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga pembiayaan), dan juga pasar. Berbagai permasalahan yang diidentifikasi dalam pengembangan tanaman pangan dan hortikultura ke depan adalah sebagai berikut:

1. Masalah permintaan di mana permintaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih sangat rendah akibat masyarakat masih banyak yang miskin dan banyak yang menganggur, dan elastisitas permintaan terhadap hasil-hasil tanaman pangan dan hortikultura masih sangat rendah. Hal ini terutama pada hasil tanaman pangan;
2. Sifat hasil tanaman pangan dan hortikultura mudah membusuk (*perishable*), sehingga memerlukan penanganan-penanganan khusus atau harus segera dijual yang mengakibatkan harganya menjadi rendah;
3. Hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura kualitasnya masih kalah dengan produksi luar negeri. Hal ini dapat terlihat pada buah-buahan yang dijual supermarket kebanyakan buah-buahan impor yang sebenarnya memiliki harga jual yang lebih tinggi namun diminati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas;
4. Harga jual produksi tanaman pangan lebih mahal daripada harga jual produksi tanaman pangan dari luar negeri, seperti harga jual beras produksi Indonesia lebih mahal daripada harga beras di luar negeri sehingga hasil produksi komoditas tertentu Indonesia kalah bersaing di pasar domestik maupun internasional;
5. Sumber daya manusia yang masih memiliki pengetahuan tentang cara budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang masih terbatas;
6. Konversi lahan yang terus berlangsung dari lahan pertanian menjadi non-pertanian, sehingga penguasaan lahan petani semakin lama semakin kecil;
7. Penggunaan teknologi yang masih rendah yang berakibat pada produktivitas yang rendah dan kualitas hasil pertanian yang rendah;
8. Modal petani yang terbatas sehingga hasil panen tidak dapat disimpan untuk menunggu harga yang pantas, selain itu modal juga menjadi penghambat bagi para petani untuk meningkatkan skala usaha baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi.

D. USULAN CARA PENANGANAN MASALAH

Masalah Permintaan

Upaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura masih terus harus digalakkan ke depan, selain untuk memenuhi permintaan dalam negeri untuk beberapa komoditas tertentu, seperti beras, juga untuk menangkap peluang pasar di luar negeri. Upaya pertanian pangan terutama dibutuhkan dalam rangka menjaga ketahanan pangan masyarakat Indonesia ke depan. Selain itu, pengembangan tanaman pangan dan hortikultura dilakukan pada tanaman yang berorientasi ekspor (memiliki peluang ekspor) dan atau yang dibutuhkan industri dalam membuat barang jadi.

Pada tanaman pangan, yang perlu dikembangkan lebih lanjut salah satunya adalah tanaman jagung yang masih memiliki pasar ekspor dan juga dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti makanan dan dapat menjadi pakan ternak maupun ikan. Pada tanaman hortikultura, terdapat banyak potensi besar seperti tanaman obat (biofarmaka), sayur-sayuran, tanaman hias, dan tanaman buah yang akan semakin banyak di konsumsi oleh masyarakat dan memiliki pasar di dunia internasional.

Pemilihan komoditas unggulan tentu saja didasarkan pada permintaan pasar yang tersedia. Untuk itu, pemerintah juga harus aktif dalam mencari informasi tentang peluang-peluang pasar yang ada di luar negeri dan melakukan program-program yang mendorong para petani untuk melakukan budidaya pada komoditi-komoditi tersebut. Upaya mendorong industrialisasi yang memiliki ketersediaan bahan baku di dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan petani juga perlu untuk dilakukan pemerintah, sebab harga jual komoditi ke luar negeri tentu saja jauh lebih murah bila dibandingkan dijual dalam bentuk setengah atau barang jadi.

Sifat hasil tanaman pangan dan hortikultura mudah membusuk (*perishable*)

Dalam rangka menanggulangi permasalahan ini dibutuhkan adanya penanganan-penanganan khusus dalam proses pertanian. Menurut Gumbira-Said dan Intan (2001), bentuk-bentuk penanganan khusus tersebut adalah:

- Pegepakan (*packing*)
Pengepakan dilakukan sebelum proses pengangkutan dimulai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kerusakan selama proses pengangkutan. Selain itu, pengepakan juga melindungi produk selama proses penyimpanan. Jenis dan cara pengepakan disesuaikan dengan dengan jenis produk dan angkutan yang digunakan serta lama dan jauhnya jarak pengangkutan.
- Penyediaan sarana pendingin (*cooling* dan *freezing*) khususnya pada hasil tanaman hortikultur sehingga hasilnya dapat bertahan lebih lama;
- Pengangkutan dengan cepat

Pengangkutan buah-buahan dan sayur-sayuran harus dilakukan dengan cepat dan hati-hati, dan selama proses pengangkutan, tingkat kelembapan dan suhu harus tetap dijaga karena buah-buahan dan sayuran sangat peka terhadap kelembapan dan suhu.

- Melakukan pengolahan

Pengolahan juga dapat membuat produk pertanian bertahan lebih lama. Bentuk pengolahan dapat dilakukan secara sederhana maupun modern, seperti membuat asinan buah-buahan, keripik dari singkong, jagung kering, jamu dari tanaman obat, dan lain sebagainya.

Kualitas yang Masih Rendah

Hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura Indonesia kebanyakan kualitasnya masih kalah dengan produksi luar negeri. Hal ini dapat terlihat pada buah-buahan yang dijual supermarket yang kebanyakan buah-buahan impor. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan petani tentang cara budidaya yang baik dan cara penanganan pasca panen dan serta pengetahuan standar mutu yang dibutuhkan. Selain itu penggunaan teknologi yang tepat perlu diterapkan.

Hasil tanaman pangan dan hortikultura seringkali tidak diterima di pasaran internasional karena kualitasnya yang rendah dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor. Masalah yang dihadapi produk hortikultura Indonesia di pasaran internasional adalah kandungan bahan kimia yang tinggi, tampilan luar produk yang belum bagus, serta kandungan serangga dan jamur.

Harga Jual

Pengembangan tanaman pangan misalnya pada beras dikhususkan hanya pada upaya pemenuhan kebutuhan lokal. Cara yang dapat ditempuh untuk menurunkan harga produksi yang berakibat pada turunnya harga jual produksi, adalah dengan meningkatkan produktivitas pada tanaman padi masyarakat. Penciptaan varietas-varietas unggul yang mampu menghasilkan hasil panen yang lebih besar perlu dilakukan pemerintah dengan lebih intensif melakukan penelitian dan kajian mengenai varietas-varietas unggul dan juga penanggulangan penyakit-penyakit yang banyak menyerang tanaman petani. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan para ilmuwan baik dari lembaga-lembaga penelitian maupun dari perguruan tinggi.

Selain itu, sebaiknya pemerintah sebisa mungkin tidak melakukan impor beras, karena akan merusak harga beras di Indonesia, sehingga menurunkan pendapatan petani. Mata rantai perdagangan yang terlalu panjang perlu juga untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kebanyakan keuntungan justru dinikmati oleh pedagang antara, sementara petani yang bersusah payah justru mendapatkan keuntungan yang kecil. Oleh karena, upaya memperpendek mata rantai perdagangan tanaman pangan dan hortikultura perlu dilakukan oleh pemerintah.

Upaya lain dalam menurunkan harga jual petani agar kompetitif dengan harga hasil tanaman pangan dan hortikultura dari luar negeri adalah dengan memberikan subsidi atau bantuan dalam bentuk pupuk, pestisida, dan sarana produksi lainnya, sehingga biaya produksi petani dapat menurun. Hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan petani yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat Indonesia.

Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang cara budidaya yang baik

Keterbatasan pengetahuan petani tentang cara budidaya yang baik berakibat pada rendahnya kualitas dan produktivitas pertanian mereka. Peran serta pemerintah dan swasta dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada petani tentang tata cara budidaya yang baik perlu untuk terus ditingkatkan. Pendidikan formal dan non formal, terutama yang berbasis keilmuan agribisnis dan ilmu-ilmu pendukungnya perlu mendapat perhatian yang besar. Selama ini, pemberdayaan lembaga pendidikan formal di Indonesia dalam mendukung usaha pertanian masih sangat kurang, berbeda dengan Malaysia di mana salah satu lembaga pendidikan formalnya, yaitu Universitas Putera Malaysia telah turut serta dalam menghasilkan tenaga-tenaga terdidik yang mampu menjadikan Malaysia sebagai negara penghasil terbesar kelapa sawit. Begitu pula Universitas Kasetsart, Thailand, yang telah berhasil menghasilkan tenaga-tenaga terdidik di bidang agribisnis, dibuktikan dengan berkembang pesatnya agribisnis buah-buahan dan hortikulturnya.

Konversi lahan

Khusus untuk pengaturan penggunaan tanah pada tahun 1996, ada Surat Edaran Menteri Negara Agraria kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia mengenai "pencegahan konversi tanah sawah irigasi teknis menjadi tanah kering", yang meminta agar tidak dilakukan/tidak terjadi lagi alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif beririgasi teknis menjadi lahan penggunaan nonpertanian. Akan tetapi, aturan lain yang lebih kuat untuk mencegah alih fungsi lahan tersebut belum ada sehingga alih fungsi lahan tersebut tetap saja terjadi sampai saat ini.

Mengharapkan tata ruang untuk dapat mengendalikan alih fungsi lahan memang tidak berlebihan. Untuk itu, perlu disusun rencana tata ruang yang baik bagi seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN), rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), bahkan sampai rencana detail tata ruang kota. Saat ini semua rencana tata ruang tersebut sudah ada, namun belum diikuti dengan baik oleh para pihak terkait. Dengan berjalannya waktu, mungkin rencana tata ruang tersebut sudah tidak relevan dan perlu direvisi. Persoalan memang timbul lagi dengan adanya wilayah baru seperti provinsi dan/atau kabupaten/kota baru sebagai akibat pemekaran

wilayah, yang kemungkinan belum punya rencana tata ruang wilayahnya. Persoalan ini cukup potensial untuk terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Fenomena "pengingkaran" rencana tata ruang tersebut dapat dilihat dengan mudah seperti misalnya jika kita pergi mengamati pinggiran kota-kota di Indonesia dengan mudahnya kita dapat melihat konversi lahan ini dalam wujud pembangunan rumah, jalan/jembatan, kawasan pabrik, dan pusat perbelanjaan di atas tanah sawah yang secara fisik kelihatan subur dan selalu mendapat pengairan dari saluran irigasi teknis.

Dalam hubungannya dengan kebijakan dan upaya pengaturan penggunaan tanah dengan memperhatikan aspek pertanian dan nonpertanian dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, ada baiknya untuk mengambil hikmah dari pengalaman negara yang telah lebih dahulu melaksanakan kebijakan dan upaya tersebut dengan relatif baik.

Ambil saja contohnya Taiwan. Pada awalnya, pemerintah Taiwan tidak ketat mengontrol alih fungsi lahan dari lahan pertanian kepada penggunaan nonpertanian. Akan tetapi, melihat proses alih fungsi lahan yang tidak terkendali maka pemerintah mengontrol alih fungsi lahan tersebut dengan mengatur melalui peraturan dan hukum yang jelas, di antaranya *Agricultural Development Act* tahun 1999. Di lain pihak, pemerintah juga menentukan kriteria dan persyaratan seseorang bisa dikatakan sebagai predikat petani. Prediket ini dapat dilihat pada *ID card* (KTP), lalu dibuat aturan bahwa hanya orang yang berpredikat petani dapat membeli lahan pertanian. Di samping itu, juga diberi batasan luas lahan yang dapat dibeli dan dimiliki oleh seorang petani.

Dalam perjalanannya, kebijakan ini berjalan efektif sehingga alih fungsi lahan di Taiwan dapat dicegah/dibatasi. Akan tetapi, setelah sekian lama berjalan, di samping aspek positifnya, terjadi juga dampak kurang baiknya. Misalnya, lahan penggunaan nonpertanian seperti untuk industri, perdagangan/jasa, dan sektor lainnya menjadi sangat terbatas sehingga menghambat kelancaran pembangunan ekonomi dan investasi.

Bahkan, dampaknya dapat berupa pemindahan perusahaan manufaktur dan investasi dari Taiwan ke Cina Daratan (*Mainland China*). Hal ini juga disebabkan oleh karena upah tenaga kerja di Taiwan sangat mahal, sedangkan di Cina daratan harga tanah dan upah tenaga kerja relatif jauh lebih murah.

Melihat kondisi demikian, pemerintah Taiwan mulai lagi mengkaji ulang kebijakan pengontrolan alih fungsi lahan pertanian yang sangat ketat tersebut. Akibatnya diambil kebijakan baru yaitu memperlonggar aturan alih fungsi lahan sehingga nonpetani pun dapat membeli tanah pertanian meskipun dengan jumlah yang terbatas dan harus mengubah *land use plan* yang ada. Dengan demikian, para pebisnis, investor, dan industriawan dapat membeli dan memanfaatkan tanah tersebut untuk keperluan bisnisnya di luar kegiatan pertanian.

Hikmah yang dapat diambil dari kebijakan dan pengalaman Taiwan tersebut adalah bahwa dalam menyusun rencana tata guna tanah (*land use planning*) tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang sangat kompleks dan multidimensi serta

berkaitan dengan sumber daya tanah tersebut. Di samping itu, juga perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan jauh ke depan perkembangan dinamika masyarakat sehingga perlu menggunakan proses perencanaan strategis dengan menentukan visi, misi, proyeksi ke depan.

Cara lain yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan penguasaan lahan bagi para petani, adalah dengan berusaha menggeser tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian ke sektor industri. Cara ini telah banyak ditempuh oleh negara-negara lain dan mereka sukses dalam meningkatkan jumlah kepemilikan lahan petaninya.

Penggunaan teknologi yang masih rendah

Penggunaan teknologi dalam pertanian mencakup aplikasi dari bioteknologi, mekanisasi, biokimia, teknik kimia, teknik fisika, teknologi nuklir, mikro elektrik, teknologi dirgantara, komunikasi dan perhubungan, geodesi dan geologi, serta jenis teknologi lainnya. Yang telah nyata peranannya hingga saat ini adalah bioteknologi (bibit unggul), teknik kimia (pupuk, hormon, dan pestisida), dan teknik mekanisasi yang mencakup mesin dan alat-alat pertanian (Gumbira-Said dan Intan, 2001).

Selama ini, petani di Indonesia telah banyak menggunakan teknik kimia dalam proses pertaniannya. Cara pemberian pupuk, hormon dan pestisida banyak diperoleh petani melalui penyuluhan yang dilakukan pemerintah maupun dunia usaha. Selain itu, bagi pengalaman di antara petani, dan juga diperoleh melalui proses eksperimen.

Kondisi tanah yang berbeda-beda, tentu saja membuat perlakuan yang dibutuhkan berbeda pula, untuk itu perlu adanya kajian-kajian mengenai kondisi tanah wilayah-wilayah yang ada di Indonesia serta tanaman yang cocok untuk dikembangkan, dan cara pemupukan yang tepat.

Upaya mekanisasi di dalam proses budidaya tanaman pangan dan hortikultura oleh juga belum berlangsung secara baik bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebanyakan petani hanya menggunakan peralatan-peralatan sederhana dalam proses bertaniannya, sehingga belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Kebanyakan yang menggunakan peralatan pertanian yang canggih hanya banyak digunakan oleh dunia usaha yang memiliki permodalan yang besar, karena peralatan-peralatan pertanian tersebut mempunyai harga yang sangat mahal karena sebagian besar merupakan produk impor dari luar negeri. Upaya penciptaan industri-industri peralatan pertanian sebenarnya telah dicanangkan pemerintah sejak REPELITA I, namun hasilnya belum menggembirakan karena teknologi yang dikembangkan Indonesia jauh ketinggalan dengan negara-negara maju. Hal lain yang menyebabkan industri peralatan pertanian Indonesia tidak terlalu berkembang karena sebagian besar komponen peralatan teknologi yang di produksi Indonesia merupakan komponen impor, sehingga harga

peralatan produksi pertanian tersebut juga mengalami peningkatan drastis akibat depresiasi rupiah terhadap dollar US pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia.

Penerapan bioteknologi juga merupakan pilihan yang baik untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman pangan dan hortikultura di Indonesia. Sebagai perbandingan, pengembangan dan adopsi berbagai prinsip bioteknologi telah mampu membawa Amerika Serikat dan Kanada menjadi produsen dan pengolah produk-produk pertanian terkemuka di dunia.

Penerapan bioteknologi di bidang produksi sebagaimana disebutkan oleh Gumbira-Said dan Intan (2001), mempunyai kelebihan dibanding penerapan teknologi konvensional, yaitu:

1. Prinsip-prinsip bioteknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki karakteristik tanaman sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen.
2. Prinsip-prinsip bioteknologi mempunyai potensi untuk melestarikan sumberdaya alam dan meningkatkan mutu lingkungan dengan memanfaatkan organisme terkekaya genetika untuk mendegradasi bahan-bahan kimia beracun.

Lebih lanjut Gumbira-Said dan Intan berpendapat bahwa penerapan bioteknologi dalam agribisnis dapat dilakukan dengan tiga strategi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan bioteknologi yang mencakup teknik-teknik DNA rekombinan, transfer gen, manipulasi embrio, transfer embrio, regenerasi tanaman, kultur sel dan jaringan, antibodi monoklonal, dan rekayasa bioproses. Teknik-teknik tersebut digunakan untuk menemukan berbagai informasi untuk mengelucidasi struktur gen, fungsi dan pengaturan mekanisme fotosintesis, mendiagnosis penyakit, pengembangan dan penggunaan hormon-hormon pertumbuhan, dan menjelaskan proses fiksasi nitrogen.
2. Aplikasi bioteknologi dalam agribisnis dalam rangka peningkatan produksi pangan nasional dengan cara mengembangkan dan menerapkan penggunaan biofertilizer, biopestisida, dan melaksanakan manajemen penanganan hama terpadu. Dengan aplikasi tersebut, kerugian lingkungan atas dampak negatif praktek-praktek agribisnis konvensional terhadap lingkungan dapat pula dihindari. Berbagai biofertilizer yang telah berhasil dikembangkan di negara-negara maju adalah *rizhobium*, *ektomikoriza*, dan *blue green algae*, seharusnya juga dikembangkan di Indonesia dalam rangka menjamin ketahanan pangan nasional yang berwawasan lingkungan. Biopestisida yang merupakan senyawa alami antihama dan penyakit, bukan senyawa xenobiotik yang rekalsitran, yang diproduksi secara bioteknologi dan aman bagi lingkungan. Biopestisida yang telah berhasil dikembangkan adalah toksin dari bakteri *Bacillus thuringiensis*, ekstrak biji nimba, ekstrak akar tuba, ekstrak biji sirsak, dan lain-lain.

3. Penerapan bioteknologi untuk melakukan diversifikasi pangan. Berbagai teknik biokonversi dan teknologi enzim mampu mengubah suatu produk (atau limbah agroindustri) menjadi multiproduk yang diinginkan konsumen. Di samping itu, metode-metode tradisional berupa fermentasi untuk menghasilkan makanan dan minuman juga dapat dikembangkan sehingga diperoleh bioproses yang memiliki kinerja, efisiensi, dan efektivitas proses, serta produktivitas yang tinggi. Bahan-bahan makanan yang banyak mengandung protein dan lemak hewani dapat disubstitusi dengan bahan-bahan nabati dengan prinsip-prinsip bioteknologi tanpa mengubah rasa, tekstur, dan aromanya.

Modal petani yang terbatas

Masalah modal merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh para petani yang memang rata-rata merupakan penduduk yang dekat dengan kemiskinan. Rendahnya modal telah membuat para petani berhubungan dengan rentenir ataupun terpaksa terikat dengan para pedagang sehingga tingkat pendapatannya yang dapat diperolehnya menurun. Masalah modal ini juga mengakibatkan para petani tidak mampu untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan hasil produksinya. Lembaga-lembaga perbankan yang ada saat ini, sebagian besar enggan untuk memberikan kredit kepada para petani karena dalih resiko yang besar. Peran serta pemerintah dalam mendorong perbankan-perbankan yang ada, khususnya bank-bank pemerintah, diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini. Pembiayaan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada produsen primer tetapi juga usaha yang ada di hulu dan hilir. Usaha di hulu dibiayai untuk memperlancar arus distribusi dan penyediaan input-input pertanian seperti usaha pembibitan, industri obat-obatan, industri pupuk, industri peralatan pertanian, lembaga jasa distribusi input-input pertanian. Pembiayaan pada sektor hilir meliputi pembiayaan agroindustri, lembaga-lembaga pemasaran, dan pedagang-pedagang antara, sehingga distribusi hasil produksi petani dapat berjalan lancar.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Sub sektor tanaman pangan dan hortikultura Indonesia masih memiliki prospek untuk dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Permintaan domestik maupun luar negeri, ketersediaan lahan, kondisi alam yang mendukung, dan ketersediaan tenaga kerja merupakan alasan-alasan kenapa subsektor ini masih berpotensi untuk terus dikembangkan.

Berbagai permasalahan yang melanda pengembangan sub-sektor ini seperti masalah permintaan yang rendah dan elastisitas yang rendah, sifat hasil tanaman

pangan dan hortikultura yang mudah membusuk (*perishable*), kualitas yang rendah, biaya produksi yang tinggi, sumber daya manusia, konversi lahan, dan modal yang terbatas harus diselesaikan tidak hanya oleh petani dan dunia usaha yang bergerak di dalamnya, namun juga memerlukan keikutsertaan pemerintah selaku regulator dan fasilitator.

Upaya mendorong usaha tani komoditi-komoditi yang berorientasi ekspor dan dibutuhkan dalam agroindustri perlu terus untuk dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, upaya mendorong subsistem agribisnis hulu (penghasil benih, pupuk, dan peralatan pertanian) dan hilir (agroindustri) perlu untuk dilakukan pemerintah dalam rangka menjamin keberlangsungan pengembangan usaha pertanian di bidang sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura.

Rantai penghubung antara kalangan industri dengan petani juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Selama ini petani tidak banyak mendapatkan keuntungan karena banyaknya pedagang antara yang banyak mengeksploitasi petani yang tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil produksinya secara cepat, sehingga perlu ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperpendek mata rantai perdagangan, sehingga petani dapat memperoleh tingkat pendapatan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfian , M. dan Arman Wijonarko. 2000. Kondisi dan Tantangan ke depan Sub Sektor Tanaman Pangan. *Proceedings of the Fourth Symposium on Agri-Bioche*.
- Biro Pusat Statistik. 2007. Diambil dari www.bps.go.id.
- DEPTAN RI. 2005. Kinerja Ekspor-Import Produk Pertanian RI 2005. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Deptan RI.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Deptan RI pada www.deptan.go.id.
- Gumbira-Said, E. dan A.Harizt Intan. 2001. Manajemen Agribisnis. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Haris, A. 2003. Saatnya Petani Indonesia Harus Berproduksi. Pikiran Rakyat Edisi 20 Mei 2003.
- Murdanoto, A.P. 2002. Pengembangan Bisnis Obat Asli Indonesia dan Produk Lain Berbasis Sumber Daya Alam di Indonesia. Materi Ceramah Mata Kuliah Magister Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Pikiran Rakyat. 2003. Kebijakan Pangan Harus Dirombak. Harian Umum. Terbitan 15 maret 2007.

Trubus. 2000. Mengangkat Derajat Obat Tradisional. No. 364, Edisi Maret – TH. XXXI.